

TESIS

**KEBIJAKAN PEMERINTAH REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE TIMOR-LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PENYELESAIAN BATAS WILAYAH DARAT**



Oleh :

RODRIGO DE MENDONÇA
NO. MHS 115201730/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2013



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Rodrigo de Mendonça
Nomor Mahasiswa : 115201730/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Indonesia dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat.

Nama Pembimbing

Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum.

Tanggal

2/1/13

Tanda Tangan

R. S.

B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum.

1/5/13

B. R. I.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rodrigo de Mendonça
Nomor Mahasiswa : 115201730/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Agraria
Judul Tesis : Kebijakan Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste* dan Indonesia dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat.

Nama Tim Pengudi
(Ketua) Dr. Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum. : _____
(Sekretaris) B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum. : _____
(Anggota) Anny Retnowati, S.H., M.Hum. : _____

Tanggal

21/5/13

Tanda Tangan

2/5/13

Ketua Program Studi MIH

(B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul "**Kebijakan Pemerintah Repúbliga Democrática de Timor-Leste dan Indonesia dalam Penyelesaian Batas Wilayah Darat**" untuk mewujudkan batas wilayah darat kedua negara dalam menjamin kepastian letak kedaulatan teritorial masing-masing negara adalah hasil karya dari penulis, di susun tanpa mengambil hasil penelitian dari peneliti lain, semua sumber atau bahan rujukan yang digunakan dalam tesis ini telah saya nyatakan dengan benar, apabila terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2013

Penulis

Rodrigo de Mendonça

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Peneliti ini dipersembahkan kepada :

1. Almahrum dan almahruma Ayah Ibunda terkasih Mariano do Rego Mendonça dan Amelia Alves Guterre Mendonça, serta saudara-saudari terkasih Joaquim Mendonça, Manuel Mendonça, dan Beatris Amelia Alves de Araujo yang telah menladahului dan selau memberikan perlindungan dalam setiap langkah dalam penyelesaian penulis ini.
2. Istri tercinta Anastasia Klau dan anak-anak tersayang Amelia Ardjita Seravina de Mendonça dan Amalia Ardjita Seravina de Mendonça (kembar), Beatrice Jacsania Cinderelli de Mendonça serta Chevchenco Franzi Rodrigo de Mendonça, serta keluarga besar Mendonça yang selama ini telah menanti dengan penuh motivasi baik materiil maupun moril dalam mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Semua teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan Januari 2012.
4. Berbagai pihak yang telah membantu baik dari proses perkuliahan sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, April 2013

Penulis

Rodrigo de Mendonça

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi norma-norma hukum yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia, serta langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah untuk menemukan solusi hukum yang tepat dalam penyelesaian batas wilayah darat dalam menjamin kepastian hukum atas kedaulatan teritorial kedua negara.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, teori keadilan sosial dan teori kepastian hukum, sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis **KEBIJAKAN PEMERINTAH REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE DAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN BATAS WILAYAH DARAT**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah hukum dan politik hukum.

Proses penetapan dan penegasan batas wilayah darat dimaksud, ditempuh melalui hubungan kerjasama kedua negara dengan dibentuknya komisi teknis perbatasan pada tahun 2001, untuk menggunakan perjanjian damai 1904 (*Treaty*) antara pemerintah koloni Portugis dan Belanda, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan perbatasan kedua negara sebagai dasar hukum dalam penetapan dan penegasan batas wilayah darat kedua negara antara Timor-Leste dan Indonesia, sebagaimana sampai dengan tahun 2005 telah mencapai 79% batas kedua negara dapat di definisikan dan sisanya tinggal 21% yang belum mencapai kesepakatan, Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan mengevaluasi norma-norma hukum apa dan langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh kedua pemerintah untuk mencapai solusi hukum dalam penyelesaian batas wilayah darat kedua negara.

Kata-kata kunci : Kebijakan, Penyelesaian, batas wilayah darat

ABSTRACT

This study aims to find, analyse and evaluate the legal norms that affect the policy the Government of Timor-Leste and Indonesia, as well as rare-steps that should be taken by the two Governments to find the right legal solution in the settlement of land boundary, lies in guaranteeing the territorial sovereignty of both countries.

This study uses the theory of public policy, social justice theory and the theory of the rule of law, as the basis for the theory is used to analyse the government policiesdemocratic Republic of East Timor and the Republic of Indonesia in the region for the Settlement Boundary Treaty. Type of research is a normative study, using the method of approach to the history of law and legal politics.

The process of setting and affirmation land boundaries is, pursued through the establishment of cooperative relations between countries with technical border commission in 2001, agreed to use the 1904 peace treaty (Treaty) between the Portuguese and the Netherlands colonies, as well as other documents relating to the border between the two colonies as a legal basis in the determination of land boundaries and affirmation of Timor-Leste and Indonesia, as well as up to 2005 has reached 79% limit can be defined between the two countries and the remaining 21% live not reach an agreement, Therefore, in this study the authors wanted to know and evaluate what the legal norms and the steps that should be taken by both governments to achieve legal solutions in resolving land boundary between the two countries.

Key words: Policies, settlement, land boundaries

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Agung atas terselesaikannya tesis ini dengan berjudul: KEBIJAKAN PEMERINTAH *REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE DAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN BATAS WILAYAH DARAT.*

Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan “ tidak ada gading yang tak retak”. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi terciptanya perbaikan tesis ini menjadi lebih baik.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi para pembaca secara umum dan bermanfaat bagi kegiatan akademik para kalangan civitas akademika.

Yogyakarta, April 2013

Penulis

Rodrigo de Mendonça

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyusunan tesis ini tentu tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. R. Maryatmo., MA, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
2. Yth. Bapak Drs. M. Parnawa P. MBA. P. HD, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya
3. Yth. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum PascasarjanaUniversitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Dr.Paulinus Soge, Drs., SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang selama ini membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Yth. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang selama ini membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Yth. Bapak/IbuDosen, Staf Administrasi dan Perpustakaan pada program Pascasarjana Magister IlmuHukumUniversitasAtma Jaya Yogyakarta.
7. Pemerintah *República Democrática de Timor-Leste*, dalam hal ini Kementerian Kehakiman, dan khususnya pada Directorat Pendaftaran Tanah,

Perumahan dan Pemetaan Nasional, yang telah memberikan kesempatan belajar dan bantuan dana dan data dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penulisan teisis ini.

Dengan demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, April 2013

Penulis

Rodrigo de Mendonça

HALAMAN MOTTO



*Dengan ilmu pengetahuan kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan
menjadi indah, dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah*

...Oleh Jenderal Sudirman...

HALAMAN QUOTES

“... Orang yang sombong dan angkuh membunuh segala sesuatu yang indah
dalam dirinya...”

-NN-

“...Bagi mereka yang telah mengerti kebenaran mulia tidak akan terpengaruh ke
dalam ajaran lain. Dengan telah sempurna diterangi oleh pengetahuan yang
sempurna, mereka berjalan seimbang diantara yang tidak seimbang...”

-Samyuta Nikaya 1,4-

DAFTAR TABEL :

Tabel 1: Jumlah pertemuan tingkat tinggi (<i>Joint Ministerial Committee and Joint Border Committee</i>) dalam membahas berbagai permasalahan perbatasan kedua Negara	79
Tabel 2: Jumlah pertemuan teknis (<i>Technical Sub. Committee Border Demarcation and Regulation</i>) untuk penyelesaian bataswilayah darat Kedua Negara (<i>Delineation and Demarcation</i>)	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Batas wilayah darat Portugis dan Belanda berdasarkan <i>Treaty</i> 1904	73
Gambar 2: Batas wilayah darat yang dipermasalahkan oleh aliran sungai Noel besi mengakibatkan berbedaan Interpretasi antara Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia di wilayah Citrana	97
Gambar 3: Batas wilayah darat yang dipermasalahkan oleh masyarakat lokal dari Indonesia di wilayah Bidjael Sunan dan Oben	99
Gambar 4: Bata swilayah darat yang masih dipermasalahkan oleh Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia di wilayah Oecusse	102
Gambar 5: Tugu batas wilayah yang dibangun oleh Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia sepanjang perbatasan darat kedua negara	110
Gambar 6: Tugu Stasium Astronomi yang dibangun oleh Pemerintah Portugis dan Belanda mengalami pergeseran di wilayah Bulu-Bulu	115
Gambar 7: Tugu batas wilayah negara yang dibangun oleh Pemerintah Portugis dan Belanda 1915 di wilayah Bidjael Sunan	116
Gambar 8: Peta batas wilayah darat yang dipermasalahkan oleh masyarakat lokal dari Indonesia di wilayah Bidjael Sunan dan Oben	119

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN DOSEN PEMBIMBIG	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
INTISARI	v
<i>ABSTRAC</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN <i>QUOTES</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
1. Rumusan masalah	18
2. Batasan masalah dan batasan konsep	19
a. Batasan masalah	19
b. Batasan konsep	19
3. Keaslian penelitian	21